

Daftar pustaka

- Acch.Kpk.go.id. (2018). Tindak pidana korupsi. Retrieved april 11, 2020, from <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Achmad, T. (2012). Dewan komisaris dan transparansi: teori keagenan atau teori stewardship? *Jurnal keuangan dan perbankan*, 16(1), 1–12.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara, 4(3), 78–89.
- Anggaran, H. P. (2020). Hindari penyalahgunaan anggaran , pemkot kendari mulai terapkan transaksi non tunai, 2018–2020.
- Arumanti, N. R. (2018). Aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan internal control sebagai variabel moderating. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004>
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi keuangan dalam e government kota bandung. *Jurnal bisnis, manajemen dan perbankan*, 5(2), 31–39. <https://doi.org/http://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2>
- Bastian, I. (2014). Lingkup akuntansi sektor publik, 1–52. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/3858/1/eksi4207-m1.pdf>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik (suatu pengantar edisi ketiga)*. Jakarta: erlangga.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, & [Www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). (n.d.). Bpk: kualitas lkpdp tahun 2018 meningkat. Retrieved september 18, 2019, from <https://www.bpk.go.id/news/penyerahan-ihps-i-tahun-2019-dari-bpk-kepada-dpd>

Bpk RI. (2019). Pp no. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Retrieved february 19, 2020, from <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah>

Centre for Bhutan Studies, & Gnh. (2017). *Health, happiness and wellbeing; implications for public policy. Happiness transforming the development landscape*. Retrieved from http://www.bhutanstudies.org.bt/wp-content/uploads/2017/05/happiness-transform_final_with-cover.pdf

Christy Natalia Lewier, & Ch. Heni Kurniawan. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten klaten, 1–14.

Dewi Asfiryati. (2017). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening, 4(1).

Diani, R. F. (2019). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten bandung barat. Retrieved from <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/863>

Fikrian, H. (2017). Pengaruh kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota pekanbaru), 4(1).

Guasmin, & Febrianti, D. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kota palu. *Jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi universitas riau*, 6(2). Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jsm/article/view/863>

Handayani, M. (2019). *Akuntansi sektor publik : dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban*. (p. Adi, ed.). Poliban press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=k17mdwaaqbaj&pg=pa92&dq=sistem+akuntansi+keuangan+daerah&hl=en&sa=x&ved=0ahukewisumxfrelnahufzzgghzo7dyaq6aeiajah#v=onepage&q=sistem akuntansi keuangan daerah&f=false>

Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota ambon, 2(1), 82–90.

Hutahayan, J. Fresly. (2019). *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi & kinerja pelayanan publik* (cetakan pe). Yogyakarta: deepublish publisher. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7ttmdwaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=tingkat+korupsi+karena+kurangnya+keterbukaan+informasi&ots=8w>

ga3d4kwx&sig=vkx5cfwvcgofkmghadktf4o-
0y4&redir_esc=y#v=snippet&q=korupsi&f=false

Indra Bastian. (2007). Pengertian akuntansi sektor publik.

Indras, & Mediakendari.com. (2019). Pemprov sultra gelar rakor pengelolaan keuangan daerah.

Kendaripos.co.id, & Heeryl. (2020). Kades woiha koltim tersangka korupsi dilimpahkan ke jaksa. Retrieved june 28, 2020, from <https://kendaripos.co.id/2020/02/kades-woiha-koltim-tersangka-korupsi-dilimpahkan-ke-jaksa/>

Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. *Ekonomika bisnis*, 02(02), hal. 357-370.

Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. (tim ub press, ed.) (cetakan pe). Malang: ub press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=vomidwaaqbaj&pg=pt136&dq=sistem+akuntansi+keuangan+daerah&hl=en&sa=x&ved=0ahukewisumxfrelnahufzzgg hzo7dyaq6aeiwjaf#v=onepage&q=sistem akuntansi keuangan daerah&f=false>

Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 6(1), 705–714. Retrieved from <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8743>

- Kurniawati, M. M. H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Lubis, F. (2019). Peran pemerintah dalam pelayanan publik atas keterbukaan informasi perekaman ktp-el di kantor kecamatan medan baru.
- Mahayuni, N. P. S., Yuniarta, G. A., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah daerah pada satuan kerja pemerintah daerah kabupaten karangasem, 8(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*.
- Mirza Masyhur. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 4.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pemalang, 1(1). Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Nasional, B. P. H. (n.d.). *Profil kabupaten kolaka timur*. Kolaka timur. Retrieved from <http://www.bphn.go.id/data/documents/13uu008.pdf>
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi sektor publik (mahir dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah)*. (fungki, ed.) (cetakan pe). Uwais inspirasi indonesia. Retrieved from

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=t_omdwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr3&dq=akuntansi+sektor+publik&ots=8m6j9simic&sig=95agn250oojcvwtam3xo9bpexek&redir_esc=y#v=onepage&q=akuntansi sektor publik&f=false

Nuraidah, W. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten konawe utara.

Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. *Technobiz : international journal of business*, 3(5), 25–3. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>

Nurhayani, H. (n.d.). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nurhayati Soleha. (2014). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan: studi pada skpd kabupaten/kota propinsi banten, 13(1), 21–34.

Oktavianto, A., & Nasionalinfo.com. (2020). Selain tidak transparan, pekerjaan jalan swakelola dinas pu koltim dinilai asal – asalan. Retrieved june 25, 2020, from <https://nasionalinfo.com/selain-tidak-transparan-pekerjaan-jalan-swakelola-dinas-pu-koltim-dinilai-asal-asalan/>

Poae, D. A., & Saerang, D. P. E. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan kabupaten kepulauan talaud, 2(1), 27–35.

- Pramesti, I., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. *Jurnal akuntansi aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2017). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar, 8(1), 99–111.
- Purnamasari, A. (2019). Peningkatkan pelayanan publik rsup dr. Kariadi semarang yang akuntabel dan anti korupsi dalam mempertahankan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, 1–10.
- Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Retrieved from <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3269/>
- Putu Sri Wahyuni, Sulindawati, N. Luh G., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2(1).
- Redaksi. (2020). Bupati: Pengelolaan Keuangan dan Aset Harus Sesuai Standar.
- Riswanda Imawan. (2002). Pengertian good governance.
- Rusmita, T. (2019). Pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten lampung selatan. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/57353/>

- Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian pendidikan : metode, pendekatan, dan jenis penellitian*. (ihsan satrya azhar, ed.) (cetakan ke). Jakarta: kencana. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=2fq1dwaaqbaj&pg=pa104&dq=jenis+data+penelitian&hl=en&sa=x&ved=0ahukewiy1-wimfvnahvwnwyskhrr1ai0q6aeiktaa#v=onepage&q=jenis+data+penelitian&f=false>
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten indragiri hulu oleh, *4*(1), 571–586.
- Sartiman, La Ode Pandi, & Inilahsultra.com. (2020). Pemprov dan tujuh kabupaten serahkan laporan keuangan ke bpk sultra, pp. 1–2.
- Sartiman, La Ode Pandi, & Inilahsultra.com. (2020). Pemprov-bank sultra bahas mekanisme transaksi nontunai, pp. 11–12.
- Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan darah (studi kasus pada kabupaten aceh utara). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, *6*(2), 73–86.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan* (cetakan ke). Bandung: alfabeta,cv. Retrieved from www.cvalfabeta.com
- Ti.or.id. (n.d.). Transparency International Indonesia. Retrieved march 28, 2020, from <https://ti.or.id/>

Timur, K. (2020). Kolaka timur galar rakernis tata kelola keuangan, 1–13.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Dania Puspitasari. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, *10*(1), 105–112. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset%0aanalisis>

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (studi pada provinsi di indonesia). *Jrak. Vol. 7 no. 1*, 7(1), 11–21.